



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 Telp.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 31 /BUA.4/PL.07/01/2020

16 Januari 2020

Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga
Tahun 2020 dan tahun 2021

- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/2020 tanggal 12 Januari 2020 tentang seperti perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Keuangan RI akan melakukan pendataan kembali BMN berupa tanah yang belum memiliki sertipikat dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI terkait percepatan pensertipikatan tanah dengan alokasi pada tahun 2020 untuk Mahkamah Agung sebanyak 48 bidang dan tahun 2021 untuk semua bidang tanah yang belum bisa dialokasikan pensertipikatan pada tahun 2020. Guna mendukung kelancaran program dari Kementerian Keuangan tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pensertipikatan Tahun 2020 —
 - a. Satuan kerja daerah untuk melakukan update seluruh data tanah baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum ke dalam aplikasi SIMANTAP dan menyampaikan ADK SIMANTAP ke KPKNL setempat;
 - b. Menyiapkan dan melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan BMN;
 - c. Mengajukan permohonan hak pakai kepada Kantor Pertanahan setempat;
 - d. Menunjukkan letak dan tanda batas bidang tanah dan memasang tanda batas tanah yang akan disertipikatkan;
 - e. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan dan pensertipikatan BMN berupa tanah;
 - f. Menyusun dan mengajukan anggaran dalam rangka pensertipikatan BMN berupa tanah sesuai mekanisme anggaran;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2020.
2. Pensertipikatan Tahun 2021
 - a. Untuk mengantisipasi tidak teralokasinya pensertipikatan tanah pada tahun 2020, satuan kerja untuk tetap mengusulkan semua bidang tanah yang belum bersertipikat pada usulan pensertipikatan tahun 2021;

- b. Usulan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 diajukan dengan mengisi format sebagaimana terlampir pada surat ini;
- c. *Softcopy* usulan pensertipikatan tanah harus sudah dikirimkan paling lambat **tanggal 24 Januari 2020**, dikirimkan melalui **email : ikn.rokap.mari@gmail.com**;
3. Koordinator Wilayah dimohon untuk meneruskan surat edaran ini agar secepatnya bisa dilaksanakan oleh satuan kerja di wilayahnya;
4. Bagi satuan kerja eselon I pusat yang terdapat BMN berupa tanah dan belum bersertipikat, untuk mengikuti langkah-langkah yang sama seperti pada huruf angka 1 dan angka 2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan

ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

LAMPIRAN III
 Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara
 Nomor : S- 3 /KN/2020
 Tanggal : 12 Januari 2020

**REKAPITULASI BIDANG TANAH YANG AKAN DISERTIPIKATKAN
 PER KEMENTERIAN / LEMBAGA
 BERDASARKAN DAFTAR NOMINATIF TAHUN 2020**

No	Kd. BA	NAMA K / L	Target Nominatif 2020
1	033	KEMENTERIAN PUPR	12,927
2	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	845
3	025	KEMENTERIAN AGAMA	506
4	060	KEPOLISIAN NEGARA RI	473
5	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	114
6	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	95
7	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	82
8	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	66
9	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	65
10	005	MAHKAMAH AGUNG	48
11	013	KEMENTERIAN HUKUM & HAM	39
12	112	BPKPBPB BATAM	36
13	117	LPP TVRI	24
14	032	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	17
15	054	BADAN PUSAT STATISTIK	16
16	006	KEJAKSAAN RI	15
17	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	15
18	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	9
19	063	BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN	5
20	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI & GEOFISIKA	4
21	056	KEMENTERIAN ATR/BPN	3
22	068	BADAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3
23	107	BADAN SAR NASIONAL	3
24	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2
25	020	KEMENTERIAN ESDM	2
26	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2
27	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2
28	104	BNP2TKI	2
29	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI	1
30	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1
31	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1
32	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1
34	081	BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAN TEKNOLOGI	1
TOTAL			15,426

LAMPIRAN IV
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor : S- 3 /KN/2020
Tanggal : 12 Januari 2020

[illegible]